

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Ansari Jalal al, *Mengenal Sistem Islam dari A Sampai Z*, Thariqul Izzah, Al-Khilafah Publication London UK, 2006.
- AR Mustopadidjaja, *SANKRI*, Jakarta, 2003.
- Miram Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Manulung, *Dasar-Dasar Manajemen*, BAPPIT, Medan, 1962.
- Gulo W, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2002.
- Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- HR Syaukani, Afan Gafar dan M Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Koesoemahatmadja R.D.H, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1979.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara RI*, Jilid I Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moenir H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Edisi ke I, Cetakan ke IV, Bumi Aksara Jakarta, 2000.
- Moh Kusnardi Moh dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Mukhsen Nuraida, *Reformasi Mana jemen Kepegawaian Untuk Meningkatkan Kapasitas Aparatur*, Kementerian PAN, Jakarta, 2002.
- Mukiyat, *Administrsi Kepegawaian Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

- Musanef, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Muslim Amran, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, PT Alumni Bandung, 1986.
- Nawawi, *Administrasi Personil Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990.
- Nigro Felix A, *Public Personal Administratrion*, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1963.
- Riwu Kaho Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Siagian Sondang P, *Administrasi Pembangunan KOnsep Dimensi dan Strateginya*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Sianipar, *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta, 2000.
- Situmorang Victor dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Situmorang Victor M, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sudiman, *Administrasi Kepegawaian*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000.
- Sugandha Dann, *Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Supriady Bratakusumah Deddy, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Supriatha Tjahja, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara Jakarta, 1993.
- Suryaningrat Bayu, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Sutopo, *Pelayanan Prima*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000.
- Syafruddin Ateng, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Thoha Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Warella Y, *Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah